

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Konsep Teoritik Kerentanan

1. Definisi Konsep Kerentanan

Kerentanan menurut Kementrian Negara Riset dan Teknologi Republik Indonesia adalah suatu kondisi yang mengakibatkan ketidakmampuan seseorang atau kelompok orang terhadap sebuah ancaman yang terjadi. Menurut Awotona dalam Marbruno Habibi unsur utama kerentanan adalah kerentanan sosial, kerentanan kelembagaan, kerentanan system, kerentanan lingkungan, kerentanan ekonomi dan kerentanan yang disebabkan karena tidak mengedepankan konsep keberlanjutan (*sustainable*).¹⁰ Kerentanan dibagi menjadi tiga tipe, yaitu kerentanan fisik binaan (infrastruktur), kerentanan sosial kependudukan, dan kerentanan ekonomi.

a. Kerentanan Fisik

Kerentanan fisik binaan (infrastruktur) menggambarkan suatu kondisi (infrastruktur) yang rawan terhadap faktor ancaman tertentu.

b. Kerentanan Sosial

Kerentanan sosial merupakan kondisi tingkat kerapuhan sosial dalam menghadapi ancaman.

¹⁰ Marbruno Habibi, "Model Spasial Kerentanan Sosial Ekonomi dan Kelembagaan Terhadap Bencana Gunung Merapi" *Jurnal PWK*, Vol. 2, No. 1, 2013, 3.

c. Kerentanan Ekonomi

Kerentanan ekonomi merupakan suatu kondisi yang menggambarkan tingkat kerapuhan ekonomi dalam menghadapi ancaman.

2.1 Tabel Jenis Kerentanan

No	Sumber Pustaka	Indikator	Variabel
1.	Bakornas (2022)	Kerentanan Fisik	1. Kepadatan Bangunan 2. Jenis Bangunan 3. Persentase Kerusakan Jaringan Jalan
		Kerentanan Sosial	1. Laju Pertumbuhan Penduduk 2. Kepadatan Penduduk 3. Penduduk Usia Lanjut dan Balita 4. Jenis Kelamin 5. Penduduk Penyandang Cacat
		Kerentanan Ekonomi	1. Persentase Rumah Tangga yang Bekerja di Sektor Informal 2. Persentase Rumah Tangga Miskin
	Himbawa	Kerentanan Sosial	1. Jenis Kelamin

	(2012)		2. Pendidikan 3. Tingkat Kesehatan
--	--------	--	---------------------------------------

Sumber: Hasil Pustaka, 2019

3. Kerentanan Sosial Ekonomi Wanita Tuna Susila

Kerentanan (*Vulnerability*) adalah kondisi yang terjadi akibat factor keadaan seperti fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan. Sedangkan Sosial ekonomi diartikan sebagai posisi seseorang pada masyarakat yang berkaitan dengan orang lain dalam arti lingkungan pergaulan, prestasi, dan hak-hak beserta kewajibannya terhadap sumber daya. Variabel kerentanan yang digunakan dalam penelitian ini berdasarkan kondisi sosial ekonomi WTS dibatasi pada hal berikut:

a. Pekerjaan

Setiap individu memiliki jenis pekerjaan yang bervariasi. Bekerja merupakan bentuk usaha yang bertujuan memperoleh penghasilan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Jenis pekerjaan berdasarkan ISCO (*International Standart Classification of Oeception*) terdiri dari enam bentuk yaitu jasa, petani, ahli teknik dan jenis, kepemimpinan dan tata laksana, administrasi dan tata usaha, serta operator alat angkut.

- 1) Tenaga kerja terampil (*Skilled Labour*), adalah pekerja yang mempunyai bekal keterampilan yang berasal dari lembaga formal seperti sekolah ataupun lembaga informal seperti kursus.
- 2) Tenaga kerja tidak terampil (*Unskilled Labour*), adalah pekerja yang tidak mempunyai keterampilan khusus untuk menunjang pekerjaan.¹¹

b. Pendapatan

Penghasilan secara bahasa menurut Poerwadarminto artinya hasil dari usaha.¹² Secara istilah menurut Sukirno dalam Anwar menjelaskan penghasilan atau *income* adalah seluruh penerimaan berupa uang atau selain uang bagi individu atau rumah tangga pada periode tertentu.¹³

Menurut BPS tahun 2014, golongan pendapatan penduduk dibedakan menjadi empat yaitu:

- 1) Golongan pendapatan sangat tinggi dengan rata-rata > Rp 3.500.000 per bulan.
- 2) Golongan pendapatan tinggi dengan rata-rata antara Rp 2.500.000 – Rp 3.500.000 per bulan.
- 3) Golongan pendapatan sedang dengan rata-rata antara Rp 1.500.000 – Rp 2.500.000

¹¹ Irawan dan Suparmoko, *Ekonomika Pembangunan* (Yogyakarta: Kementerian Negara Perumahan Rakyat, 2001), 88.

¹² W.J.S Poerwadarminto, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2002), 228.

¹³ A.A. Anwar Prabu Mangkunegara, *Manajemen Sumber Daya Manusia* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 47.

- 4) Golongan pendapatan rendah dengan rata-rata kurang dari Rp 1.500.000 per bulan.¹⁴

c. Pendidikan

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia arti pendidikan adalah proses perubahan sikap dan tingkah laku seseorang dalam upaya mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran dan pelatihan, proses perbuatan cara mendidik. Sedangkan menurut Ihsan pendidikan yaitu usaha manusia untuk menumbuhkan dan mengembangkan potensi jasmani ataupun rohani sesuai dengan nilai-nilai masyarakat dan kebudayaan.¹⁵ Salah satu tujuan pendidikan termaktub jelas dalam Pembukaan UUD 1945 yaitu mencerdaskan kehidupan bangsa.

Dengan pendidikan khususnya bagi golongan miskin dapat membuka kesempatan menemukan lapangan baru yang memberi hasil lebih tinggi, menentukan jati diri, hidupnya terarah dan bermanfaat. Pendidikan formal meliputi menurut Pasal 17 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Dasar, Pasal 18 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang Pendidikan Menengah, Pasal 19 UU Sisdiknas No. 20 Tahun 2003 tentang Perguruan Tinggi. Sedangkan pendidikan nonformal dapat diperoleh dari lembaga kursus atau pelatihan kerja. Berikut merupakan penjabaran dari pendidikan formal:

1) Pendidikan Dasar

¹⁴ Badan Pusat Statistik Tahun 2014.

¹⁵ Fuad Ihsan, *Dasar-Dasar Kependidikan* (Jakarta: Rineka Cipta: 2003), 12.

Pendidikan dasar merupakan jenjang yang melandasi pendidikan menengah. Bentuk satuan pendidikan dasar yang menyelenggarakan program 6 tahunan terdiri atas Sekolah Dasar (SD) dan Madrasah Ibtidaiyah (MI). Sedangkan bentuk 3 tahun setelah 6 tahun adalah Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Madrasah Tsanawiyah (MTs).

2) Pendidikan Menengah

Pendidikan menengah merupakan kelanjutan pendidikan dasar yang terdiri atas pendidikan menengah umum dan menengah kejuruan. Bentuk satuan pendidikan menengah terdiri dari Sekolah Menengah Atas (SMA), Madrasah Aliyah (MA), Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) dan bentuk lain yang sederajat.

3) Pendidikan Tinggi

Pendidikan tinggi merupakan jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang meliputi program pendidikan Diploma, Sarjana, Magister Spesialis, Doktor yang diselenggarakan Perguruan Tinggi dalam bentuk akademik, politeknik, sekolah tinggi, institute atau universitas.

d. Kemiskinan dan Pemenuhan Kebutuhan Hidup

Secara harfiah kemiskinan berasal dari kata dasar miskin yang mempunyai arti “tidak berharta benda”. World Bank (2000) menyatakan kemiskinan adalah istilah untuk kekurangan dan

kesejahteraan. Jadi bila disimpulkan kemiskinan adalah kondisi ketidak mampuan yang dialami individu, kelompok dan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidup minimum.¹⁶ Penyebab terjadinya kemiskinan menurut asal mulanya terdiri dari kemiskinan natural, kemiskinan kultural, dan kemiskinan structural.

- 1) Kemiskinan natural adalah kemiskinan yang terjadi karena factor alamiah. Kemiskinan seperti ini adalah mengalami cacat, sakit, usia lanjut dan bencana alam. Dan keadaan kelompok masyarakat dari awal memang telah miskin. Karta Sasmita menjelaskan kondisi tersebut sebagai "*persisten proverty*" adalah kemiskinan yang bersifat kronis atau dalam artian terjadi secara umum. Umumnya kemiskinan tersebut terjadi pada daerah yang kritis sumber daya alam atau terisolasi.
- 2) Kemiskinan kultural adalah kemiskinan yang bersumber pada kultur, budaya, atau adat istiadat yang dianut oleh suatu kelompok masyarakat. Kemiskinan ini mengacu pada sikap hidup seseorang atau sekelompok masyarakat yang disebabkan gaya atau kebiasaan hidup (malas, enggan memperbaiki kualitas hidup, boros, nerimo, apatis, tidak disiplin dan sebagainya) dimana mereka hidup tidak berkecukupan dan selalu merasa kekurangan.

¹⁶ Bambang Rustanto, *Menangani Kemiskinan* (Bandung: pt Remaja Rosdakarya, 2015), 2.

3) Kemiskinan struktural adalah kemiskinan karena factor buatan manusia seperti kebijakan ekonomi yang tidak adil, distribusi pendapatan yang tidak merata, korupsi dan kolusi, dan tatanan ekonomi dunia yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu. Kemiskinan ini muncul akibat adanya upaya dalam mengatasi kemiskinan natural yaitu dengan diadakanya berbagai macam program dan kebijakan, namun pada pelaksanaanya terjadi ketidak seimbangan pada sumber daya yang tidak merata dan kesempatan yang tidak sama sehingga menyebabkan keikutsertaan masyarakat tidak merata pula sehingga terjadi ketimpangan pada struktur masyarakat

B. Konsep Teoritik Wanita Tuna Susila

1. Pengertian Wanita Tuna Susila

Kata pelacuran atau prostitusi berasal dari bahasa Latin *prostituere* atau *pro-stauree* yaitu perbuatan secara terang-terangan membiarkan diri melakukan perzinahan. Paul Moedikno menjelaskan pelacuran merupakan penyerahan badan wanita dengan menerima bayaran kepada banyak orang, untuk pemuasan nafsu seksual orang-orang tersebut. Selaras dengan pendapat W.A Bonger bahwa pelacuran atau prostitusi adalah gejala sosial ketika wanita menyediakan dirinya untuk perbuatan seksual sebagai mata pencahariannya.¹⁷

¹⁷ A.S Alam dan Amir Ilyas, *Kriminologi Suatu Pengantar* (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 113.

Pelaku pelacuran di masyarakat umumnya dikenal dengan berbagai sebutan seperti *sundal*, *ayam*, *kupu-kupu malam*, *lonte*, *purel*, *balon*, *begenggek*, dan lain-lain. Koentjoro mendefinisikan dengan sebutan wanita tuna susila yaitu perempuan yang tidak menuruti aturan susila yang berlaku di masyarakat dan dianggap tidak memiliki adab dan sopan santun dalam berhubungan seksual.¹⁸

2. Faktor Pendukung Pelacuran

Terdapat berbagai faktor yang dapat memicu terjadinya tindakan pelacuran antara lain sebagai berikut:

a. Faktor Moral

Rendahnya moral dan ketidaktakwaan terhadap ajaran agama, tingkat pendidikan keluarga yang rendah, serta pornografi dan pergaulan tanpa batas yang berkembang secara bebas.

b. Faktor Ekonomi

Kemiskinan dalam mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari dan keinginan memenuhi kebutuhan mewah atau gaya hidup dengan cepat dan mudah. Dan faktor lain yaitu sulitnya mencari lapangan pekerjaan, pendidikan rendah, dan keterbatasan keterampilan.

c. Faktor Sosiologis

Ajakan teman atau terpengaruh lingkungan sekitar. Didukung pendidikan minim dan tanpa pikir panjang hingga akhirnya mudah

¹⁸ Koentjoro, *On The Spot: Tutur dari Seorang Pelacur* (Yogyakarta: CV Qalams, 2004), 30.

terbujuk dan terkena tipuan. Biasanya dijanjikan pekerjaan terhormat dengan gaji yang tinggi.

d. Faktor Psikologis

Hubungan keluarga yang disharmonis, kekerasan seksual, dan pengalaman traumatis (luka jiwa) serta timbul rasa ingin membalas dendam akibat kegagalan perkawinan, dimadu, telah dinodai kekasihnya lalu ditinggalkan.

e. Faktor Kemalasan

Faktor yang terjadi karena psikis, mental, dan semangat yang rendah dalam menghadapi persaingan hidup. Hanya dengan berpikir pendek dengan modal fisik dan kecantikan akan mudah mendapatkan uang.

f. Faktor Biologis

Adanya nafsu seks yang abnormal, terintegrasi dalam kepribadian sehingga selalu merasa tidak puas ketika mengadakan hubungan seks dengan pasangan.

g. Faktor Yuridis

Tidak terdapat undang-undang yang secara jelas melarang kegiatan pelacuran dan hubungan seks sebelum pernikahan atau di luar pernikahan, sedangkan pada perundangan tertentu hanya menjerat bagi germo atau mucikari.

h. Faktor Pendukung

Terdapat media atau alat yang mendukung kegiatan pelacuran. Dengan adanya teknologi pendukung seperti media sosial atau ponsel memudahkan proses transaksi pada kegiatan pelacuran.¹⁹

3. Karakteristik Wanita Tuna Susila

Secara umum wanita tuna susila memiliki karakteristik yang nampak secara fisik pada kehidupan sehari-hari yang dikemukakan oleh Kartini Kartono beberapa diantaranya sebagai berikut:

- a. Perempuan yang cantik, ayu, rupawan, aktraktif dan menarik dari segi wajah maupun tubuhnya yang dapat merangsang gairah kaum lelaki.
- b. Pakaian lebih terbuka dan mencolok serta memperhatikan penampilan lahirannya dari pakaian, rambut, make-up, dan parfum guna menarik perhatian lelaki.
- c. Teknik seksualnya bersifat mekanis, tanpa afeksi, dan cenderung kasar.
- d. Sering berpindah tempat dalam melakukan pekerjaannya. Berasal dari kalangan rendah maupun menengah. Pada kalangan profesional menengah ke atas biasanya beroperasi secara amatir dan terselubung.
- e. 50% lebih wanita tuna susila memiliki intelek yang normal. Kurang dari 5% dari mereka yang lemah ingatan dan selebihnya tidak menentu atau tingkat inteligensinya tidak jelas.²⁰

¹⁹ Endang Sedyaningsih, *Perempuan Keramat Tunggak* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1999), 70.

²⁰ Paisol Burlian, *Patologi Sosial* (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2016), 57.

C. Teori Konflik Kepentingan

1. Orientasi Konflik Kepentingan

Konflik artinya percekocokan, perselisihan, dan pertentangan. Konflik diartikan sebagai benturan kekuatan dan kepentingan antara satu kelompok dengan kelompok yang lain dalam proses perebutan sumber-sumber kemasyarakatan seperti ekonomi, politik, sosial, dan budaya yang relatif terbatas.²¹ Berdasarkan perspektif Ralf Dahrendorf, konflik terjadi melalui relasi-relasi sosial dalam sistem. Maka konflik tidak mungkin melibatkan individu atau kelompok yang tidak terhubung dalam suatu sistem.

Dalam teori Dahrendorf, relasi-relasi pada struktur sosial ditentukan oleh kekuasaan.²² Kekuasaan yang dimaksud Dahrendorf adalah kekuasaan atas kontrol dan sanksi yang memungkinkan pemilik kekuasaan memberikan perintah dan meraih keuntungan dari mereka yang tidak berkuasa. Jadi berdasarkan pandangan Dahrendorf, konflik kepentingan menjadi sesuatu yang tidak dapat dihindarkan dari relasi antara pemilik kekuasaan dan mereka yang tidak berkuasa. Dahrendorf menyebut adanya kepentingan laten sebagai peran yang diharapkan, sementara kepentingan manifes adalah kepentingan laten yang menjadi sadar.

²¹ Robert MZ. Lawang, *Buku Materi Pokok Pengantar Sosiologi* (Jakarta: Universitas Terbuka, 1994), 53.

²² Novri Susan, *Pengantar Sosiologi Konflik dan Isu-Isu Konflik Kontemporer* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), 39.

Konflik merupakan gejala yang serba hadir pada masyarakat dan senantiasa melekat pada setiap masyarakat dan akan lenyap bersama lenyapnya masyarakat itu sendiri. Oleh karena itu konflik hanya bisa diatur dan dikendalikan saja agar konflik yang terjadi tidak menimbulkan bentuk kekerasan. Cara menangani konflik menurut Dahrendorf tergantung pada tiga hal:

- a. Kedua belah pihak harus mengakui kenyataan dari situasi politik yang terjadi diantara mereka, dengan kata lain harus terdapat pengakuan atas kepentingan yang diperjuangkan oleh pihak lain.
- b. Kepentingan yang diperjuangkan harus terorganisasikan secara rapi, tidak tercerai berai dan tidak terkotak-kotak sehingga masing-masing pihak memahami dengan jelas lingkup tuntutan pihak yang lain.
- c. Kedua pihak harus menyepakati aturan mainnya yang menjadi landasan dan pegangannya di dalam berinteraksi diantara mereka.

Setelah ketiga syarat tersebut terpenuhi maka Dahrendorf menyebut tiga bentuk pengaturan konflik. Pertama, bentuk konsiliasi yang dilaksanakan melalui parlemen yang mana seluruh pihak berdiskusi dan berdebat secara terbuka untuk mencapai kesepakatan. Menurut Nasikum lembaga tersebut harus memenuhi beberapa kriteria antara lain:

- a. Lembaga tersebut harus bersifat otonomi dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan tanpa ada campur tangan dari badan-badan lain.
- b. Kedudukan lembaga tersebut pada masyarakat harus bersifat monopolitif artinya hanya lembaga itu yang bersifat demikian.
- c. Peranan Lembaga tersebut harus sedemikian rupa sehingga berbagai kelompok yang berlawanan satu sama lain merasa terikat dengan keputusan oleh lembaga tersebut.
- d. Lembaga tersebut bersifat demokrasi, dalam mana setiap pihak diberi kesempatan untuk menyatakan pendapat sebelum keputusan diambil. Oleh karena itu tanpa ada pihak-pihak yang monopoli pembicaraan dan memaksakan kehendak.

Kedua, sedangkan dalam bentuk mediasi dalam kedua pihak sepakat mencari nasehat dari pihak ketiga. Ketiga, pada bentuk arbitran kedua pihak sepakat mendapat keputusan yang bersifat legal sebagai jalan bagi konflik. Disini pihak ketiga bertindak sebagai arbitrator tetapi para pihak mempunyai hak untuk menerima atau menolak keputusan yang diambil oleh wasit. Dari ketiga cara pengendalian konflik yang dikemukakan oleh Dahrendorf dipandang sebagai cara berdiri dan memiliki daya kemampuan untuk menghindarkan kemungkinan terjadinya ledakan sosial dalam bentuk kesadaran.

2. Kelompok Masyarakat

Tugas utama teori konflik adalah menganalisis berbagai peranan kekuasaan dalam masyarakat. Kemudian, Dahrendorf membagi kelompok dalam tiga tipe kelompok besar, yaitu :

- a. Adanya Kelompok Semu
- b. Adanya Kelompok Kepentingan
- c. Adanya Kelompok Konflik

Kelompok semu ialah sejumlah pemegang posisi dengan adanya kepentingan yang sama, dan mereka belum menyadari keberadaannya. Itu juga termasuk dalam tipe kelompok ke dua yaitu kelompok kepentingan. Kemudian lahirlah kelompok ketiga, yaitu kelompok konflik sosial, yang mana berasal dari kepentingan-kepentingan tersebut.²³

D. Kerangka Berpikir

Kerangka berpikir merupakan sintesa dari berbagai teori hasil penelitian yang menunjukkan ruang lingkup satu atau lebih variabel yang diteliti.²⁴ Gambaran awal kerangka berpikir pada penelitian ini diawali dengan menjelaskan kondisi kerentanan sosial ekonomi yang menyebabkan seorang wanita bekerja menjadi WTS di lokasi yang dinaungi oleh mucikari atau geromo. Menggeluti dunia pelacuran merupakan cara WTS dalam mengatasi permasalahan sosial ekonominya .

²³ Nasrullah Nasir, *Teori-Teori Sosiologi* (Bandung: Widya Padjajaran, 2009), 25.

²⁴ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Alfabet, 2016), 35.

WTS yang terjaring razia oleh Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) di wilayah lokalisasi yang berada di Jawa Timur, selanjutnya akan diberikan program pembinaan dan rehabilitasi oleh pemerintah melalui lembaga rehabilitasi sosial Unit Pelaksana Teknis Rehabilitasi Sosial Bina Karya Wanita Kediri yang secara normatif memiliki visi dan misi untuk meningkatkan sumber daya wanita supaya dapat menjalankan kehidupan dengan lebih baik. Namun hal ini juga bertentangan dengan perbedaan kepentingan pada kondisi sosial ekonomi yang diperjuangkan oleh WTS

2.2 Bagan Kerangka Berpikir

